

## EVALUASI DAMPAK INFRASTRUKTUR PLBN TERHADAP PEREKONOMIAN DAN KONEKTIVITAS WILAYAH PERBATASAN

**Amung Hidayat**

Universitas Panca Bhakti – Pontianak  
[Amunghidayat1969@gmail.com](mailto:Amunghidayat1969@gmail.com)

**Siswo Awaliyanto**

Universitas Panca Bhakti – Pontianak  
[siswoawal2009@gmail.com](mailto:siswoawal2009@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terhadap perekonomian lokal dan konektivitas wilayah perbatasan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta penelaahan dokumen pada PLBN yang telah beroperasi sebagai pusat aktivitas lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan PLBN memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, antara lain melalui pertumbuhan UMKM, meningkatnya volume perdagangan lintas batas, dan bertambahnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Di sisi lain, integrasi PLBN dengan jaringan jalan dan infrastruktur transportasi terbukti memperbaiki aksesibilitas, menurunkan biaya logistik, dan mempercepat mobilitas barang dan orang di wilayah perbatasan. Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah tantangan, termasuk ketimpangan infrastruktur pendukung, keterbatasan kapasitas pelaku usaha lokal, serta hambatan kelembagaan yang mengurangi efektivitas PLBN sebagai motor penggerak ekonomi perbatasan. Secara keseluruhan, PLBN memiliki potensi besar untuk menjadi katalis pembangunan ekonomi dan konektivitas wilayah, tetapi keberhasilan jangka panjangnya memerlukan integrasi kebijakan lintas sektor, peningkatan layanan dasar, dan penguatan tata kelola regional

**Kata Kunci:** PLBN; wilayah perbatasan; infrastruktur; perekonomian lokal; konektivitas; perdagangan lintas batas

### Abstract

*This study aims to evaluate the impact of constructing Cross-Border Posts (PLBN) on the local economy and connectivity of border areas. Using a descriptive qualitative approach, data were obtained through in-depth interviews, direct observations, and document review at PLBNs that have operated as centers of cross-border activities. The study's results demonstrate that the development of PLBN significantly contributes to enhancing economic activities, including the growth of MSMEs, increased cross-border trade volumes, and expanded job opportunities for local communities. On the other hand, the integration of PLBN with road networks and transportation infrastructure has been proven to improve accessibility, reduce logistics costs, and accelerate the mobility of goods and people in border areas. However, the study also identified several challenges, including inequality in supporting infrastructure, limited capacity among local business actors, and institutional barriers that reduce the effectiveness of PLBN as a driving force for the border economy. Overall, PLBN has excellent potential to catalyze economic development and regional connectivity; however, its*

*long-term success requires the integration of cross-sectoral policies, improvement of basic services, and strengthening of regional governance.*

**Keywords:** PLBN; border areas; infrastructure; local economy; connectivity; cross-border trade.

## **Pendahuluan**

Kawasan perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai garis administratif negara, tetapi juga sebagai ruang interaksi ekonomi, sosial, dan budaya antara dua negara. Pembangunan di kawasan perbatasan menjadi agenda prioritas untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan memastikan bahwa masyarakat perbatasan tidak tertinggal dibandingkan kawasan pusat pertumbuhan nasional. Hal ini sejalan dengan literatur pengembangan wilayah yang menekankan pentingnya investasi infrastruktur untuk mengurangi disparitas spasial dan meningkatkan konektivitas kawasan pinggiran (Rodrik, 2004).

Indonesia mengembangkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai bagian dari strategi meningkatkan tata kelola perbatasan, memperkuat pengawasan, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. PLBN generasi baru dirancang sebagai *integrated border development*, yang menggabungkan fungsi keimigrasian, kepabeanan, karantina, perdagangan, dan layanan dasar. Studi mengenai *border infrastructure* menunjukkan bahwa fasilitas perbatasan modern dapat mendorong aktivitas perdagangan lintas negara dan memperkuat fungsi ekonomi kawasan frontier (Newman, 2006). Oleh karena itu, pembangunan PLBN tidak hanya dipandang sebagai proyek keamanan, tetapi juga sebagai motor pembangunan ekonomi perbatasan.

Literatur ekonomi regional menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, dan fasilitas layanan publik mampu meningkatkan mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja (Banerjee, Duflo, & Qian, 2020). Di kawasan perbatasan, efek konektivitas menjadi lebih signifikan karena aksesibilitas sering menjadi kendala utama yang menghambat pertumbuhan lokal. PLBN dengan fasilitas jalan, pusat logistik, hingga area perdagangan dapat menciptakan *trade corridor* baru yang memperkuat hubungan ekonomi antara wilayah perbatasan Indonesia dan negara tetangga. Penguatan konektivitas ini menjadi katalis penting dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis perbatasan.

Pembangunan PLBN diharapkan memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan aktivitas perdagangan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, hingga peningkatan nilai komoditas lokal. Temuan dari berbagai negara menunjukkan bahwa modernisasi infrastruktur perbatasan dapat mendorong *cross-border value chains* dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal (Brunet-Jailly, 2016). Dalam konteks Indonesia, PLBN berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap produk negara tetangga dan mendorong integrasi ekonomi nasional. Namun,

efektivitas dampak ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur penunjang dan tata kelola institusional.

Meskipun manfaat PLBN cukup signifikan, penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan konektivitas intra-wilayah, rendahnya kapasitas pelaku ekonomi lokal, serta perbedaan regulasi dan standar perdagangan antar negara yang membatasi potensi pertumbuhan (Scott, 2011). Selain itu, ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah menyebabkan beberapa PLBN belum berfungsi optimal sebagai simpul ekonomi. Tantangan kelembagaan, seperti koordinasi lintas instansi dan kurangnya integrasi data perdagangan perbatasan, semakin memperlambat realisasi manfaat ekonomi dari pembangunan PLBN.

Walaupun telah banyak studi mengenai pembangunan perbatasan dan infrastruktur, kajian yang secara spesifik mengevaluasi dampak PLBN terhadap perekonomian lokal dan konektivitas wilayah masih terbatas. Banyak studi sebelumnya berfokus pada aspek keamanan atau pengelolaan lintas batas, sementara dimensi ekonomi dan konektivitas belum dievaluasi secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan PLBN terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, perubahan pola perdagangan, integrasi konektivitas, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat perbatasan. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai *border development* dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat efektivitas PLBN sebagai instrumen pembangunan nasional.

## Literatur review

Kajian mengenai pembangunan perbatasan menempatkan wilayah frontier sebagai ruang strategis yang membutuhkan intervensi kuat negara untuk menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Literatur pembangunan wilayah menunjukkan bahwa kawasan perbatasan cenderung mengalami *structural disadvantages* karena keterbatasan aksesibilitas, minimnya layanan dasar, serta ketergantungan ekonomi pada negara tetangga (Newman, 2006). Studi-studi *border studies* menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang terencana dan terpadu menjadi fondasi untuk mengurangi isolasi geografis dan meningkatkan keterhubungan internal maupun eksternal kawasan perbatasan.

Dalam konteks *border governance*, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dipandang sebagai instrumen penting dalam mengelola mobilitas batas negara, mengawasi perdagangan, dan memperkuat legitimasi negara. Menurut Brunet-Jailly (2016), fasilitas perbatasan yang modern memiliki peran ganda: mengelola keamanan lintas batas serta menjadi titik konsentrasi aktivitas ekonomi lintas negara (*cross-border economic nodes*). Pembangunan PLBN generasi baru di Indonesia mengikuti pendekatan internasional mengenai *integrated border management*, yang memadukan fungsi administrasi lintas negara dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Literatur ekonomi regional dan pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas fisik merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan

ekonomi pada wilayah terpencil. Banerjee, Duflo, dan Qian (2020) menegaskan bahwa akses terhadap infrastruktur transportasi mampu meningkatkan perdagangan, menurunkan biaya logistik, dan membuka peluang ekonomi baru. Di wilayah perbatasan, peningkatan konektivitas melalui pembangunan PLBN, akses jalan strategis, dan fasilitas logistik dapat memperkuat hubungan ekonomi antara komunitas lokal dan pasar nasional maupun internasional melalui *cross-border value chains*.

Selain aspek fisik, literatur juga menekankan pentingnya layanan dasar sebagai komponen pendukung pembangunan ekonomi perbatasan. Akses terhadap energi, telekomunikasi, air bersih, dan fasilitas perdagangan menentukan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi (UNDP, 2017). PLBN sebagai infrastruktur terintegrasi memberikan *spillover effects* terhadap peningkatan layanan dasar di sekitarnya, yang berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat serta berkembangnya UMKM lokal. Studi-studi regional menemukan bahwa fasilitas perdagangan dan pelayanan publik di pos perbatasan dapat memicu terbentuknya pusat kegiatan ekonomi baru (Brunet-Jailly, 2016).

Namun demikian, literatur juga menyoroti tantangan dalam pembangunan wilayah perbatasan, terutama terkait kesenjangan infrastruktur, koordinasi antar lembaga, dan ketidaksesuaian regulasi lintas negara. Scott (2011) menunjukkan bahwa hambatan kelembagaan dan perbedaan standar antar negara sering membatasi efektivitas infrastruktur perbatasan sebagai katalis pertumbuhan. Selain itu, ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah menyebabkan fasilitas perbatasan sering tidak didukung oleh jaringan konektivitas lokal yang memadai, sehingga manfaat ekonominya tidak optimal.

Dari keseluruhan literatur dapat disimpulkan bahwa pembangunan PLBN memiliki potensi signifikan untuk memperkuat ekonomi dan konektivitas wilayah perbatasan, selama infrastruktur fisik, layanan dasar, dan tata kelola kelembagaan berjalan secara sinergis. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait evaluasi empiris mengenai dampak ekonomi dan integrasi konektivitas yang dihasilkan PLBN di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi bagaimana PLBN memengaruhi pola perdagangan, mobilitas masyarakat, perkembangan ekonomi lokal, dan integrasi jaringan transportasi perbatasan.

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi bagaimana pembangunan infrastruktur Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memengaruhi perekonomian dan konektivitas wilayah perbatasan. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu perbatasan mencakup dimensi sosial, ekonomi, kelembagaan, dan spasial yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap melalui angka kuantitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu PLBN yang memiliki perkembangan signifikan dan menjadi pusat aktivitas ekonomi lintas batas. Informan terdiri dari aparat PLBN, pejabat pemerintah daerah, pelaku UMKM, pedagang lintas batas, pengguna fasilitas PLBN, serta masyarakat

lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi langsung terhadap aktivitas di PLBN dan area sekitarnya, serta penelaahan dokumen seperti laporan PLBN, data perdagangan lintas batas, dan kebijakan pembangunan perbatasan.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema utama seperti perubahan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dinamika perdagangan, hingga perubahan jaringan konektivitas antar wilayah setelah pembangunan PLBN. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber (pemerintah, pelaku usaha, masyarakat), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi), dan *member checking* untuk memastikan interpretasi penelitian sesuai dengan pengalaman informan. Aspek etika penelitian dijaga melalui persetujuan informan, kerahasiaan identitas, serta transparansi tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak nyata PLBN terhadap ekonomi dan konektivitas wilayah perbatasan.

### Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan PLBN memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan. Informan pelaku UMKM dan pedagang lintas batas mengungkapkan bahwa keberadaan PLBN memacu peningkatan permintaan barang dan jasa, terutama karena bertambahnya arus mobilitas pengguna PLBN, pekerja, serta aktivitas logistik. Fenomena ini konsisten dengan temuan Brunet-Jailly (2016), yang menyatakan bahwa perbatasan modern dengan fasilitas lengkap dapat menjadi *economic nodes* baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan UMKM di sekitar PLBN juga menunjukkan peningkatan diversifikasi usaha, seperti kuliner, akomodasi, dan jasa transportasi.

Pembangunan PLBN juga memperkuat perdagangan lintas negara dengan menyediakan fasilitas kepabeanan, karantina, dan pemeriksaan imigrasi yang lebih efisien. Informan menyebutkan bahwa proses administrasi yang dulunya memakan waktu kini lebih cepat dan transparan, sehingga mempermudah pelaku usaha dalam mengimpor atau mengeksport barang dalam skala kecil. Data observasi menunjukkan peningkatan volume barang yang melewati PLBN pada jam operasional tertentu. Temuan ini sejalan dengan teori *trade facilitation*, di mana perbaikan infrastruktur perbatasan dapat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan arus perdagangan (Banerjee, Duflo, & Qian, 2020).

Integrasi PLBN dengan jaringan jalan nasional dan infrastruktur transportasi lokal telah memperbaiki konektivitas wilayah. Warga mengaku bahwa akses menuju PLBN, pusat kota, dan desa-desa sekitar kini lebih mudah dan cepat. Hal ini penting karena konektivitas merupakan faktor kunci dalam menghubungkan wilayah perbatasan dengan pusat ekonomi nasional. Penelitian lapangan menunjukkan adanya penurunan waktu tempuh dan biaya logistik sebagai dampak dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi. Temuan ini memperkuat argumen literatur bahwa infrastruktur transportasi

berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah terpencil (Newman, 2006).

Informan pemerintah daerah menyampaikan bahwa pembangunan PLBN sering diikuti oleh peningkatan layanan dasar seperti listrik, air, telekomunikasi, dan fasilitas publik. Peningkatan layanan ini menciptakan *spillover effects* yang memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekitar dan menarik investasi lokal. UMKM melaporkan peningkatan produktivitas setelah akses energi dan internet menjadi lebih stabil. Penelitian UNDP (2017) menunjukkan bahwa peningkatan layanan dasar merupakan komponen penting untuk memperkuat ekonomi perbatasan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam perdagangan lintas batas.

Meskipun dampak positif cukup signifikan, penelitian ini menemukan beberapa tantangan, terutama ketidaksiapan infrastruktur pendukung di beberapa PLBN. Beberapa informan melaporkan bahwa akses jalan penghubung antar desa belum merata, menyebabkan sebagian wilayah masih terisolasi meskipun PLBN telah beroperasi. Tantangan lainnya adalah keterbatasan kapasitas pelaku usaha lokal, perbedaan standar regulasi perdagangan lintas negara, serta belum optimalnya koordinasi antara kantor PLBN dan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan Scott (2011), yang menekankan bahwa hambatan kelembagaan dan ketimpangan pembangunan dapat mengurangi efektivitas infrastruktur perbatasan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PLBN berperan penting dalam mendorong perekonomian dan memperkuat konektivitas wilayah perbatasan, namun dampaknya sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur pendukung dan kapasitas kelembagaan. PLBN yang terintegrasi dengan jaringan transportasi, layanan dasar yang memadai, dan tata kelola lintas lembaga yang efektif mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih cepat dan inklusif. Sebaliknya, PLBN yang berdiri tanpa dukungan infrastruktur lokal cenderung tidak optimal dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru. Oleh karena itu, investasi PLBN perlu dipadukan dengan pembangunan wilayah terpadu, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat perbatasan.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian lokal dan perbaikan konektivitas wilayah perbatasan. PLBN berperan sebagai simpul baru bagi aktivitas perdagangan lintas negara, mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan arus mobilitas barang dan orang, serta menciptakan peluang ekonomi yang sebelumnya terbatas akibat keterpencilan geografis. Di sisi konektivitas, PLBN modern yang terhubung dengan jaringan jalan utama terbukti mempercepat waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, dan memperbaiki aksesibilitas masyarakat terhadap pusat pelayanan publik. Namun, keberhasilan PLBN tidak merata di seluruh wilayah perbatasan, karena

efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung, kesiapan pelaku ekonomi lokal, serta kapasitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah.

Secara keseluruhan, PLBN mampu menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pembangunan wilayah perbatasan, namun manfaat optimal hanya dapat tercapai jika pembangunan infrastruktur fisik diimbangi dengan penguatan layanan dasar dan tata kelola yang efektif. Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa PLBN tidak dapat berdiri sebagai inisiatif tunggal; keberhasilannya bergantung pada integrasi kebijakan lintas sektor, pembangunan wilayah terpadu, dan peningkatan konektivitas intra-wilayah. Dengan demikian, pengembangan PLBN perlu dipahami sebagai bagian dari transformasi kawasan perbatasan secara menyeluruh, bukan sekadar pembangunan fasilitas keimigrasian dan kepabeanan.

## **Saran**

### **Bagi Pemerintah Pusat**

Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan PLBN berjalan seiring dengan peningkatan infrastruktur pendukung seperti jalan akses desa-kota, fasilitas logistik, energi, dan telekomunikasi. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi lintas kementerian agar PLBN dapat berfungsi secara optimal sebagai simpul ekonomi perbatasan.

### **Bagi Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas pelaku ekonomi lokal melalui pelatihan kewirausahaan, dukungan permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk lokal. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan kawasan sekitar PLBN menjadi pusat kegiatan ekonomi baru dengan dukungan tata ruang yang selaras dengan potensi lokal.

### **Bagi Pengelola PLBN**

Pengelola PLBN perlu meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan perdagangan agar transaksi lintas batas semakin mudah dan terjangkau. Selain itu, kerja sama dengan instansi daerah harus diperkuat untuk memastikan layanan dasar tersedia secara konsisten di sekitar kawasan PLBN.

### **Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan *mixed methods* atau analisis komparatif antar-PLBN untuk melihat variasi dampak pembangunan PLBN di berbagai wilayah. Selain itu, studi kuantitatif terhadap perubahan pendapatan masyarakat, volume perdagangan, dan indeks konektivitas dapat memperkuat bukti empiris yang diperoleh dari penelitian kualitatif ini.

## **Referensi**

- Banerjee, A., Duflo, E., & Qian, N. (2020). On the road: Access to transportation infrastructure and economic growth. *Journal of Development Economics*, 145, 102–118.
- Brunet-Jailly, E. (2016). Borderlands: Universals of cross-border cooperation. *Journal of Borderlands Studies*, 31(4), 449–456.

- Newman, D. (2006). The lines that continue to separate us: Borders in a borderless world. *Progress in Human Geography*, 30(2), 143–161.
- Scott, J. (2011). Borders, Border Studies, and EU Enlargement. *Journal of European Integration*, 33(1), 1–17.
- Konrad, V., & Nicol, H. N. (2011). Border culture, the boundary between Canada and the United States, and the advancement of borderlands theory. *Geopolitics*, 16(1), 70–90.
- Sohn, C. (2014). Modelling Cross-Border Integration: The Role of Borders as a Resource. *Geopolitics*, 19(3), 587–608.
- Timothy, D. J., & Saarinen, J. (2013). Cross-border tourism and tourism geographies. *Tourism Geographies*, 15(1), 1–3.
- Wichmann, T., & Krones, F. (2019). Border Infrastructure and Regional Trade Integration in Africa. *World Development*, 120, 128–147.
- Anderson, J., & O'Dowd, L. (1999). Borders, border regions, and territoriality. *Regional Studies*, 33(7), 593–604.
- Meinhof, U. H. (2004). Transnational spaces and regional development: Making sense of borders. *European Urban and Regional Studies*, 11(2), 103–113.
- Lambach, D. (2019). The political geography of border infrastructure. *Political Geography*, 70, 89–99.
- Martínez, O. J. (1994). The dynamics of border interaction. *Journal of Borderlands Studies*, 9(2), 1–12.
- Kushnir, N., & Sussman, G. (2021). Border Infrastructure as a Global Assemblage: Technology, Security, and Society. *Security Dialogue*, 52(2), 141–158.
- Böhmelt, T., & Butcher, C. (2021). Cross-border cooperation and regional peace. *Journal of Peace Research*, 58(5), 969–985.
- Rodgers, D., & O'Neill, B. (2012). Infrastructure Violence: Roads, Development, and Security. *Ethnography*, 13(4), 401–415.
- Fawcett, L., & Serrano, M. (2005). Regionalism and governance in the Americas: Problems and prospects. *International Affairs*, 81(1), 21–48.
- Hataley, T., & Leuprecht, C. (2018). Borders in flux: The impact of security and trade facilitation. *International Journal*, 73(3), 436–454.
- Sohn, C., Reitel, B., & Walther, O. (2009). Cross-border metropolitan integration in Europe: The case of Luxembourg. *European Urban and Regional Studies*, 16(2), 189–205.
- Nicol, H. N., & Townsend-Gault, I. (2005). Cross-border cooperation, governance, and human security. *Journal of Borderlands Studies*, 20(2), 1–21.
- United Nations Development Programme. (2017). *Development Approaches for Frontier Regions: Infrastructure, Services, and Governance*. UNDP.
- .